



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR: 14 /KP.01.00/9/2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2017**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 95 Tahun 2017, tanggal 31 Agustus 2017, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan integritas, serta komitmen tinggi, untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI
			<i>Cumlaude</i>	Disabilitas	Umum	
1	Auditor	S1 Ekonomi/ Akutansi/Hukum	2		4	6
2	Auditor	S1 Ilmu Komputer/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Komputer			1	1
3	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S1 Ekonomi/ Akuntansi			1	1
4	Analisis Perencana Penggangan	S1 Ekonomi/ Akuntansi			1	1
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1 Ekonomi/ Akuntansi			1	1
6	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	S1 Ekonomi/ Akuntansi			2	2
7	Penata Keuangan	S1 Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi			1	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI
			<i>Cumlaude</i>	Disabilitas	Umum	
8	Penata Laporan Keuangan	S1 Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi			1	1
9	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	S1 Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi			1	1
10	Analisis Kinerja	S1 Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi			1	1
11	Analisis Kebijakan Sarana Operasi	S1 Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi			1	1
12	Analisis SDM Aparatur	S1 Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi			1	1
13	Analisis Kesejahteraan Aparatur	S1 Manajemen SDM			1	1
14	Dokter	S1 Kedokteran			1	1
15	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	S1 Manajemen SDM/ Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi	1			1
16	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	S1 Manajemen SDM/ Psikologi	1			1
17	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	S1 Ekonomi/ Administrasi Negara			1	1
18	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	S1 Ekonomi/ Administrasi Negara			1	1
19	Pengembang Sarana dan Prasarana	S1 Ekonomi/ Administrasi Negara			1	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI
			<i>Cumlaude</i>	Disabilitas	Umum	
20	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	S1 Akuntansi			2	2
21	Arsiparis	D3 Kearsipan			2	2
22	Pengelola Bangunan Gedung	D3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/TI			1	1
23	Pengelola BMN	D3 Akuntansi/ Manajemen / Administrasi/ TI			2	2
24	Pengelola Kendaraan	D3 Tehnik Mesin			1	1
25	Analisis Kerjasama Luar Negeri	S1 Hubungan Internasional/ Ilmu Komunikasi/ Hukum/ Sastra Inggris	2			2
26	Analisis Informasi Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	S1 Hubungan Internasional/ Ilmu Komunikasi/ Hukum/ Sastra Inggris	1			1
27	Analisis Humas dan Protokol	S1 Public Relation/ Ilmu Komunikasi			1	1
28	Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum	S1 Hukum/ Hubungan Internasional			1	1
29	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	S1 Hukum/ Komunikasi			1	1
30	Analisis Berita	S1 Komunikasi/ Kebijakan Publik/ Sospol			1	1
31	Analisis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum	S1 Hukum/ Tehnik Informatika			1	1
32	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	S1 Hukum/ Administrasi Negara			1	1
33	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	S1 Pendidikan/ Teknologi Pendidikan			1	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI
			<i>Cumlaude</i>	Disabilitas	Umum	
34	Penyusun Kerjasama Pelatihan	S1 Manajemen/ Administrasi/ Psikologi/ Pendidikan			1	1
35	Pengelola Asrama	D3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/TI			1	1
36	Pranata Komputer	S1 Ilmu Komputer/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Komputer	1		3	4
37	Pengelola Instalasi TI	D3 TI/ Manajemen			2	2
38	Pengelola Situs Web	D3 TI/ Manajemen			2	2
39	Peneliti Pertama	S2 Hukum	3			3
40	Peneliti Pertama	S1 Hukum	4			4
41	Analisis Hukum	S2 Hukum	1		2	3
42	Analisis Hukum	S1 Hukum	1	1	1	3
43	Analisis Advokasi	S2 Hukum	1		1	2
44	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	S1 Hukum	1		1	2
Total						70

II. RENCANA PENEMPATAN FORMASI CPNS

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat:

- a. Inspektorat;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- e. Biro Administrasi Kepaniteraan;
- f. Biro Umum;
- g. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
- h. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan

- i. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria :
 - a. *Cumlaude* adalah pelamar lulusan terbaik (*Cumlaude* / dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus *Cumlaude* / pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
 - b. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disable/kebutuhan khusus.
 - c. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, dan huruf b di atas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Khusus

1. Khusus Ijazah perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan persamaan ijazah dari Instansi yang berwenang.
2. Khusus pelamar kualifikasi pendidikan S2 Hukum harus linier dengan Ijazah S1 (Sarjana Hukum).

3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 - a. D3 minimal 2.75
 - b. S1 minimal 3.00
 - c. S2 minimal 3.25
4. Perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B, atau perguruan tinggi terakreditasi B dan Program studi terakreditasi A.
5. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun per tanggal 1 September 2017

V. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman : <https://sscn.bkn.go.id>)
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - 3) Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah Asli.
 - 4) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : <https://sscn.bkn.go.id>)
 - 5) Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 (1 lembar)
- b. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
- c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 11 s.d. 25 September 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).
- d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman : <https://sscn.bkn.go.id> dimulai pada tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2017.

VI. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi yaitu sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%.
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
 - c.1. Untuk D3

- Substansi Institusi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 35%.
- Psikotes dengan bobot 40%
- Wawancara dengan bobot 25%.
- c.2. Untuk S1
 - Substansi Institusi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 20%.
 - TOEFL dengan bobot 25%
 - Psikotes dengan bobot 30%
 - Wawancara dengan bobot 25%.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi :
Hasil Verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscn.bkn.go.id>.
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan.
4. Penentuan kelulusan bagi pelamar *Cumlaude* didasarkan pada ranking IPK Ijazah yang yang dipergunakan untuk melamar setelah persyaratan lainnya terpenuhi.
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman kelulusan dilakukan melalui website pada tanggal 20 November 2017.
2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi dilaksanakan di Jakarta.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan

tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
8. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
9. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 dapat menghubungi: Telephone (021) 3863452 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, dan di Nomor HP 081323864887 (hanya menerima WhatsApp dan SMS).

Jakarta, 5 September 2017

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sebagai Ketua Panitia Seleksi,



M. Guntur Hamzah

L.

Lampiran

**JADWAL
PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman penerimaan	5 s.d. 19 September 2017
2	Pendaftaran secara Online (https://sscn.bkn.go.id)	11 s.d. 25 September 2017
3	Pengumuman seleksi administrasi	30 September 2017
4	Cetak nomor ujian secara <i>Online</i>	2 s.d. 6 Oktober 2017
5	Seleksi Kompetensi Dasar	9 s.d. 20 Oktober 2017
6	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	23 Oktober 2017
7	Seleksi Kompetensi Bidang (CAT)	25 s.d. 30 Oktober 2017
8	Seleksi Kompetensi Bidang, Wawancara, dan lain-lain	1 s.d. 8 November 2017
9	Integrasi nilai SKD dan SKB	13 s.d. 17 November 2017
10	Pengumuman kelulusan akhir secara <i>Online</i>	20 November 2017
11	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	21 November 2017 s.d. 10 Desember 2017

Catatan :

Apabila terdapat perubahan agenda dan informasi mengenai Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 dapat diunduh di laman <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Jakarta, 5 September 2017

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Selaku Ketua Panitia Seleksi,


M. Guntur Hamzah